

Komitmen Pemimpin dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus

Oleh

Intan Istiqomah, Titik Djumiarti

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Green open space (RTH) issue has been part of the municipal government of Kudus Regency policy. However, the policy had not been implemented effectively for there was only 8% of the total spaces available in the regency were used for the green open space. Participation of concerned stakeholders are necessary towards further development of the green open space (RTH). This research is a qualitative descriptive research which is aimed to know the commitment of leaders in developing Green Open Space in Kudus Regency and obstacle factors related to commitment of leaders in development of Green Open Space. This descriptive-qualitative study aimed to find out local leadership commitment in Kudus Regency to the development of the green open area (RTH). The study found that the local leaders did not have optimal commitment, as it might be evident from attitudes of leading by example, role in decision-making process, and promises to stipulate necessary local laws. The study also found some impending factors such as ineffective communication in distributing information related to green open area, lacking competency among employees, and inadequate facilities. The study recommended improvement of some local leadership supporting indicators. Authorities in the municipal government of Kudus Regency must lead by examples, provide unused area for the green open space project, and improve competencies of the employees. Education and training programs, as well as seminars, are necessary to improve human resource development. In addition, local laws concerning the green open area must be enforced.

Keywords: Commitment, Leader, Green Open Space

ABSTRAKSI

Meningkatnya pembangunan fisik kota, pertumbuhan penduduk serta berbagai aktivitas kota menyebabkan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus yang masih 8% membutuhkan peran pemangku kepentingan berupa komitmen pemimpin untuk mengembangkan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui komitmen pemimpin daerah dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dan faktor penghambat komitmen pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemimpin Kudus dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau masih belum optimal. Ditunjukkan data indikator komitmen pemimpin yaitu sikap dalam memberi teladan, peran pengambilan keputusan dan janji untuk membuat Peraturan Daerah masih belum optimal. Selain itu, ditemukan bahwa faktor penghambat dalam komitmen pemimpin berupa komunikasi pemberian informasi kepada masyarakat belum efektif, cara pemimpin beradaptasi, dan sumber daya yakni kompetensi pegawai serta peralatan masih belum optimal. Meskipun ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan oleh pemimpin daerah. Saran yang diberikan yaitu pemberian teladan kepada masyarakat, pemimpin daerah mencari lahan yang tidak terpakai, dan kompetensi pegawai yang ditingkatkan melalui diklat dan seminar, lalu pemimpin membuat peraturan daerah tentang Ruang Terbuka Hijau.

Kata Kunci: Komitmen, Pemimpin, RTH

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang/jalur dan ataumengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhtanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang secara sengajaditanam (Permen PU No. 05/PRT/M/2008). Dalam undang-undang RI No.26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha yang terletak di antara empat Kabupaten yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan

Kabupaten Jepara dan Pati, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau merupakan amanat dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana disyaratkan luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%, mengacu pada RTRW Kabupaten Kudus. Sedangkan luasan eksisting saat ini baru mencapai 8% dari 20% yang ditargetkan.

Dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan sinergitas dari para stakeholder yakni melalui komitmen atau janji dan upaya keseriusan untuk mengembangkan Ruang Terbuka Hijau agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Komitmen dalam pengembangan Ruang

Terbuka Hijau terwujud dalam cara yang dilakukan oleh Bupati dalam mewujudkan janji yang tercantum dalam misi Kabupaten Kudus mengenai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Selanjutnya dibuat dalam regulasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kudus. Komitmen pengembangan Ruang Terbuka Hijau terus berlanjut hingga ke Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Bappeda dengan peran mengkoordinasikan pembangunan daerah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan Instansi yang paling berperan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau, dan Kantor Lingkungan Hidup. Komitmen dari pemimpin yang terus menerus berlanjut membutuhkan upaya dari berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mendukung pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Tantangan yang harus dihadapi pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau yakni keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Upaya yang dilakukan pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan adanya Koefisien Daerah Hijau yakni peruntukan untuk menyediakan lahan maksimum 25% dari luas bangunan bagi pemohon IMB. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Namun dalam upaya membangun taman kota, pemimpin tidak banyak memiliki aset berupa lahan kosong di perkotaan.

Masalah selanjutnya yakni belum diatur dalam regulasi yakni Perda yang khusus memuat tentang RTH. Janji pemimpin yang dikemukakan untuk membuat Kota Kudus ditengah taman tidak tercantum dalam regulasi maupun Surat Keputusan, dan hanya disampaikan melalui forum-forum tertentu. Selain itu, program penghijauan dilakukan dengan adanya *Green and Clean*, yakni diterbitkan dalam Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2012 tentang Program Indikatif. Pelaksanaan program tersebut masih bersifat formalitas semata dan pemberian

informasi dirasa masih kurang. Hal lain yang ditemukan yakni anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau masih minim terutama untuk kegiatan pemeliharaan.

Beberapa kenyataan yang terjadi tersebut, menunjukkan bahwa masih adanya permasalahan – permasalahan terkait komitmen pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus. Berdasarkan uraian kondisi yang telah disebutkan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Komitmen Pemimpin dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus”**.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan mengenai komitmen pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus.
2. Mendeskripsikan mengenai faktor penghambat komitmen pemimpin terkait dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus.

C. KERANGKA TEORI

1. KOMITMEN PEMIMPIN

Menurut Wahyusumidjo (1994:87) menjelaskan bahwa komitmen pemimpin merupakan sikap batin, janji seorang pemimpin untuk mewujudkan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Komitmen pemimpin dapat dikatakan bagaimana pemimpin menjalankan perannya untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Peranan berarti menjawab apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya (Rostyaningsih dan Djumiarti, 2010:9). Menurut Pasolong (2013:33), peranan pemimpin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran pengambilan keputusan, yaitu pemimpin memiliki kewenangan mengambil keputusan yang berarti memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilakukan.
2. Peran memengaruhi, yaitu pemimpin harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya.
3. Peran memotivasi, yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada bawahan untuk bekerja lebih giat.
4. Peran pemimpin dengan menempatkan diri sebagai penuntun.

Tindakan komitmen pemimpin menurut Kouzes dan Posner (2004:23) yakni terdapat lima praktik kepemimpinan yaitu:

1. Mencontohkan caranya
2. Menginspirasi visi bersama
3. Menantang proses
4. Memungkinkan orang lain bertindak
5. Menyemangati Jiwa

Menurut Adisasmita (2011:8), komitmen dari pimpinan daerah harus didukung dengan adanya '*political will*' atau kemauan politik dari jajaran pimpinan. Kedua, harus didukung dengan staf dan pelaksana yang kompeten. Yang ketiga, sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah bersama DPRD mewujudkan komitmennya dalam menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggungjawab melalui adanya suatu peraturan daerah yang dibuat.

Menurut Susanto (1997:35-36) mengemukakan bahwa faktor komitmen pemimpin adalah: komunikasi, sistem reward, lingkungan kerja, dan sumber

daya. Lebih jelasnya faktor dalam komitmen pemimpin yaitu:

1. Komunikasi. Menurut Nawawi (2004:170) menyebutkan bahwa kepemimpinan dilakukan dalam organisasi sebagai kemampuan untuk menggerakkan orang-orang yang dipimpin agar bekerjasama dalam mencapai tujuan. Dalam kepemimpinan di pemerintah, pemimpin diharapkan mampu menjalankan empat fungsi komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan mendorong pencapaian tujuannya yaitu (1) Fungsi Kontrol untuk mengendalikan semua entitas yang ada dalam organisasi (2) Fungsi Motivasi yang memberikan dorongan dan apa yang harus dilakukan, (3) Fungsi Pengungkapan Emosional melalui komunikasi formal maupun nonformal dan (4) Fungsi Informatif (Robbins, 2002: 243).
2. Lingkungan Organisasi. Pemimpin publik dalam kondisi sekarang diwajibkan mengemban nilai-nilai perubahan untuk membawa organisasi publik untuk menjadi lebih profesional, akuntabel, transparan dan partisipatif. Pemimpin harus siap dengan segala dinamika dalam tubuh organisasi yang dipimpinnya. (Hutapea dkk, 2008:105).

Menurut Ibrahim (2009:94) perubahan lingkungan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan mengancam organisasi, pemimpin harus beradaptasi dan menanggapi situasi yang sedang berlangsung di lingkungan sekitarnya, dengan berpikir yang dinamis dan inovatif.

3. Faktor sumber daya menjadi faktor komitmen pemimpin dapat lihat dari teori implementasi Edward III dalam Widodo (2011:98) Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia,

anggaran, fasilitas yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (Staff)

Menurut Widodo (2011:99) Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

b. Anggaran (Budgetary)

Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Widodo (2011:101)

c. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor dalam komitmen pemimpin. Menurut Widodo (2011:103) Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam komitmen pemimpin.

D. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan komitmen pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus dan faktor penghambat komitmen pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus. Lokus penelitian atau tempat penelitian yang diambil dalam

penelitian ini yakni Kabupaten Kudus. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengampilan sampel dengan mempertimbangkan pertimbangan tertentu serta dengan *snowball sampling*. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bupati, DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, masyarakat, Satpol PP, dan Forum Komunitas Hijau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung dan tertulis, serta studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data dilakukan melalui reduksi data, triangulasi dengan sumber, dan menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan seluruh data hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Data didapatkan dari hasil wawancara kepada para informan yang terpilih, studi pustaka, dan studi dokumen. Hasil penelitian dapat diperoleh sebagai berikut.

A.1 Komitmen Pemimpin dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus

1) Sikap Pemimpin

Dalam mencapai tujuan untuk mengembangkan RTH dibutuhkan sikap pemimpin dengan praktik kepemimpinan yakni dimulai dengan cara pemimpin memberikan teladan, pemimpin menginspirasi visi bersama, pemimpin mencari peluang, peran pemimpin dalam memelihara peran masyarakat untuk membantu pemimpin, sistem *reward* yang diberikan pemimpin. Berikut ini analisis sikap yang dimiliki pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus :

a. Teladan yang Diberikan Pemimpin

Didalam praktik kepemimpinan yang diungkapkan oleh Kouzes dan Posner (2004:23) menyatakan bahwa pemimpin yang mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan dimulai dengan mencontohkan caranya dengan memberikan teladan.

Dari hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa dalam memberikan keteladanan untuk menjaga Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat masih belum terlihat. Masyarakat tidak pernah melihat bentuk keteladanan yang diberikan pemimpin secara langsung dalam kegiatan seperti *Car Free Day*(CFD), ataupun kegiatan yang diadakan pemimpin untuk masyarakat Kabupaten Kudus seperti jalan santai. Padahal dalam kegiatan CFD yang beberapa kali diikuti oleh Bupati, terdapat sampah yang berserakan.

Selain tindakan teladan yang diberikan Bupati, diperlukan teladan dari pemimpin SKPD Pemimpin Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta pemimpin Kantor Lingkungan Hidup telah memberikan contoh kepada bawahannya dengan menekankan untuk hidup bersih dan melakukan kegiatan menanam pohon bersama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pamudji (1992:114) bahwa teladan diharapkan memberikan contoh-contoh kepada orang-orang yang harus digerakkan, agar mereka mengikuti apa yang mereka lihat.

b. Cara yang Dilakukan Pemimpin untuk Menginspirasi Visi Terkait Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Visi atau kata lain dari mimpi, cara pandang yang ada dalam benak pemimpin untuk mengembangkan Ruang Terbuka Hijau disampaikan dengan kata-kata yang dipahami oleh bawahan sehingga pemimpin memperoleh dukungan atas visi yang telah dibuat.

Cara pandang atau visi terkait pengembangan RTH dapat dilihat adanya ide oleh Bupati Kudus yakni 'Kudus ditengah Taman'. Dalam upaya untuk menginspirasi visidilakukan melalui berbagai kegiatan untuk terus memberikan dukungan kepada bawahan, memperluas komunikasi melalui rapat formal maupun informal.

Melalui gagasan dari Bupati Kudus, lalu disampaikan kepada SKPD seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus untuk mendapatkan dukungan dan mampu diwujudkan secara bertahap.

c. Cara yang dilakukan Pemimpin untuk Mencari Peluang dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Cara yang dilakukan pemimpin untuk mencari peluang dari keterbatasan lahan dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan sistem sewa seperti pembangunan *rest area* di Tanggul Angin menggunakan lahan pihak PT. KAI. Selain itu, masih terdapat lahan tidak terpakai di Desa Purwosari yang dulunya terminal, namun upaya pengembangan RTH di lokasi tersebut masih belum direncanakan.

d. Peran Pemimpin dalam Memelihara Peran Masyarakat untuk Mencapai Tujuan

Peran pemimpin dalam memelihara peran masyarakat untuk tujuan dilakukan dengan mengajak untuk ikut berkontribusi mengembangkan Ruang Terbuka Hijau privat dan menjaga fasilitas di taman kota. Hal ini dilakukan agar menciptakan kerjasama dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemimpin dalam memelihara peran

masyarakat untuk membantu pemimpin untuk mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan keberadaan Forum Komunitas Hijau untuk upaya mengatasi masalah terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Peran Forum Komunitas Hijau menekankan pada proses penyadaran masyarakat secara bertahap, hal tersebut dinilai cukup membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Keberadaan Forum Komunitas Hijau dalam menyadarkan masyarakat dilakukan secara aktif melalui 14 komunitas yang ada didalamnya, proses penyadaran dilakukan secara langsung yakni berupa pemberian informasi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti membuang sampah di sungai. Tidak hanya itu, Forum Komunitas Hijau ikut berkontribusi dengan mencabuti paku di pohon-pohon sepanjang jalan serta ikut dalam pelatihan bank sampah.

e. Reward yang diberikan Pemimpin

Pemimpin telah memberikan penghargaan kepada masyarakat dengan penghargaan program *Green and Clean*. Penghargaan ini diberikan dalam rangka adanya keikutsertaan masyarakat dalam berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan dan penghijauan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin mengakui dan menghargai apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa program penghargaan *Green and Clean* dilakukan setiap tahun dari tahun 2012. Program *Green and Clean* yakni lomba kebersihan dan penghijauan tingkat SKPD hingga desayang diharapkan masyarakat lebih sadar untuk menjaga lingkungan..

Melalui penghargaan *Green and Clean* menunjukkan bahwa pemimpin Kabupaten Kudus menghargai atas

keberhasilan yang dicapai masyarakat dalam berkontribusi menjaga lingkungan. Penghargaan ini diharapkan mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dengan membuat lingkungan tempat tinggal lebih sejuk dan menjaga kebersihan lingkungan.

2. Peran Pemimpin

Komitmen pemimpin dapat dikatakan bagaimana pemimpin menjalankan perannya untuk bawahan dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan RTH yang sudah ditentukan yakni minimal 30%. Peranan berarti menjawab apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemimpin dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Berikut ini analisis peran yang dimiliki pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus :

a. Peran Pengambilan Keputusan

Menurut Pasolong (2013:33) peran pengambilan keputusan yaitu memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan, siapa yang melakukan, dan kapan akan dilakukan. Dalam peran ini, terfokus pada menetapkan prioritas, strategi, dan alokasi sumber daya.

Pengambilan keputusan untuk mengembangkan Ruang Terbuka Hijau menjadi suatu proses yang harus dijalankan pemimpin untuk mendapatkan keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan yakni kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah diskusi. Diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dilakukan saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan rapat Dewan.

Dilihat dari skala prioritas Ruang Terbuka Hijau di RPJMD Kabupaten Kudus masih jauh dengan kegiatan-

kegiatan lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, belum adanya Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau menyebabkan peran pengambilan keputusan menjadi agak terhambat, sehingga dibutuhkan peran DPRD untuk segera membuat Perda khusus RTH.

b. Peran Mempengaruhi

Peran memengaruhi yang dilakukan pemimpin dalam rangka kegiatan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus dilakukan dengan memberikan contoh dalam bertindak dan menumbuhkan rasa percaya diri. Hal ini dilakukan agar bawahan dapat meniru tindakan atau ucapan yang diberikan pemimpin.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa peran pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dilakukan dengan mengajak kepada bawahan dan masyarakat untuk mewujudkan “Kota Kudus ditengah Taman”, ajakan yang disampaikan tersebut berdampak hingga mempengaruhi bawahannya seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup untuk merealisasikan “Kota Kudus ditengah Taman”.

Peran mempengaruhi yang dilakukan oleh pimpinan SKPD seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dilakukan dengan menekankan hidup bersih dan menjaga lingkungan, sehingga bawahan merasa termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Peran pimpinan SKPD Kantor Lingkungan Hidup dalam mempengaruhi bawahan dilakukan dengan banyak bekerja dan sedikit dalam ucapan.

c. Peran Memotivasi

Peran memotivasi dari Bupati sering memberikan dorongan di tiap rapat koordinasi sehingga memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal. Motivasi yang

sering diberikan kepada Bupati yakni menekankan kebersihan di lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan kerja. Selain itu, Bupati kerap memberikan dorongan untuk mewujudkan ‘Kota Kudus ditengah Taman’ dengan memberikan gambaran masa depan jika gagasan tersebut mampu diwujudkan.

Motivasi yang diberikan pimpinan SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dilakukan dengan menekankan kebersihan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan kebersihan di sekitar tempat tinggal dan lingkungan kerja. Tindakan motivasi yang diberikan pimpinan Kantor Lingkungan Hidup yakni dengan memacu bawahan untuk disiplin dalam bekerja.

d. Peran Penuntun

Peranan penuntun yang dilakukan pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan menampilkan perilaku positif dan sebagai mengarahkan bagi bawahan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Bupati sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Kudus dalam menjalankan peran penuntun ditunjukkan dengan menampilkan sikap dan perilaku positif kepada bawahan seperti mengedepankan sikap disiplin dalam bekerja.

Dalam program Ruang Terbuka Hijau, peran penuntun kepada masyarakat dilakukan dengan pemberian informasi berjenjang dari SKPD terkait seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Kantor Lingkungan Hidup pemberian informasi dilakukan kepada tiap Kecamatan dengan mengundang perwakilan dari Ibu PKK agar turut mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Privat di pekarangan rumah.

Didalam lingkup organisasi, peran penuntun dilakukan pimpinan SKPD yakni

seperti yang dilakukan pimpinan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan memberikan arahan kepada bawahan, memberikan motivasi untuk mewujudkan 'Kota Kudus ditengah Taman' melalui hal-hal terkecil dengan menjaga kebersihan lingkungan. Tidak hanya itu, pimpinan Kantor Lingkungan Hidup dalam menjalankan peran penuntun melakukan dengan memberikan semangat kepada bawahan untuk bekerja tepat waktu, selain itu memantau jika ada pekerjaan yang belum selesai.

3. Janji Pemimpin

Pelaksanaan komitmen pemimpin tidak hanya sekedar janji seremonial yang diucapkan ketika pelantikan, namun harus diperlihatkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini analisis janji pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus:

a. Legalisasi Penegakan Hukum Atas Janji Program Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus

Legalisasi penegakan hukum atas janji program Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah sehingga ada kepastian hukum dalam program Ruang Terbuka Hijau.

Pemerintah Kabupaten Kudus, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 2012-2032 telah mengatur mengenai ruang terbuka hijau. Peraturan ini sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kudus mengembangkan Ruang Terbuka Hijau. Kemudian diimplementasikan dalam program P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) di tahun 2012 melalui penyusunan peta komunitas hijau, dan penyusunan masterplan ruang terbuka hijau.

Hasil penelitian di bab tiga menunjukkan bahwa komitmen pemimpin

dalam legalisasi penegakan hukum atas janji Ruang Terbuka Hijau masih belum ada. Dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan Peraturan Daerah sehingga menunjukkan komitmen pemimpin benar-benar serius.

Melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemimpin masih rendah atas legislasi penegakan hukum, sehingga hal ini dikhawatirkan akan menggeser kawasan Ruang Terbuka Hijau menjadi pemukiman dan tidak ada efek jera terhadap masyarakat yang melanggar.

b. Resistensi Hukum dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Resistensi hukum dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau berarti adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, penolakan ini berupa adanya aksi penolakan secara langsung kepada Pemerintah Daerah terhadap pembangunan Taman Menara.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masih ada penolakan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau terjadi karena perbedaan nilai dan tujuan. Hal ini bermula ketika pembangunan Taman Menara yang berlokasi di Terminal Ringin, yang terletak di kawasan wisata Menara Kudus. Hal yang dikhawatirkan khususnya yakni pangkalan ojek maupun becak akan dipindah seiring dibangunnya taman, yang tentu saja akan membuat peziarah semakin jauh dari tempat mereka berdagang.

Namun seiringnya berjalannya waktu, dan pembangunan Taman Menara sudah selesai dikerjakan, para pelaku usaha modal transportasi di Terminal Ringin "terpaksa" menerima keberadaan taman. Teknik menghadapi resistensi atas pembangunan Taman Menara dilakukan dengan adanya negosiasi dengan Pemkab Kudus, dengan menawarkan alternatif lain yakni dipindah ke terminal yang lebih

bersih namun agak jauh dari tempat peziarah.

A.2 Faktor Penghambat Komitmen Pemimpin dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus

1. Komunikasi

Kepemimpinan berhubungan erat dengan komunikasi, tujuan komunikasi adalah mencapai kesamaan makna. Pada dasarnya kesamaan makna ini merupakan upaya untuk mempengaruhi karena makna yang dimaksud adalah makna yang dikehendaki oleh satu pihak yang ditujukan pada pihak lain. Berikut ini analisis komunikasi pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus :

a. Fungsi Informatif yang Diberikan Pemimpin Kepada Masyarakat

Komunikasi yang dilakukan pemimpin terkait fungsi informatif dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan cara pemimpin memberikan informasi berjenjang kepada bawahan. Hal ini dimaksudkan agar adanya umpan balik yang baik dari masyarakat dalam fungsi informatif.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemimpin telah berupaya untuk melakukan fungsi informatif dengan mensosialisasikan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan komunikasi berjenjang. Bentuk informasi yang diberikan pemimpin kepada masyarakat yakni dengan komunikasi berjenjang seperti di tingkat Kelurahan melalui ibu-ibu PKK. Mereka dihimbau untuk menambah dan mempercantik pekarangan rumah dengan menanam tanaman. Selain itu, adanya pemberian informasi untuk menjaga fasilitas di taman dengan memasang papan larangan.

Penyampaian informasi yang diberikan pemimpin hingga ke masyarakat sudah disampaikan melalui komunikasi berjenjang namun belum ada perubahan perilaku yang terlihat secara signifikan, sehingga tujuan dari pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan mengajak masyarakat masih menjadi kendala. Tentu hal ini menjadi faktor penghambat dalam komitmen pemimpin khususnya terhadap sikap pemimpin dalam memelihara peran masyarakat untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau.

2. Lingkungan Organisasi

Berikut ini analisis iklim lingkungan yang diciptakan pemimpin dalam menghadapi perubahan :

a. Cara Pemimpin Beradaptasi

Cara pemimpin beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang sewaktu-waktu terjadi merupakan suatu hal yang harus dilakukan, mengingat tantangan yang semakin berat dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dinamika yang harus dihadapi dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau yakni meningkatnya konservasi lahan, sempitnya lahan, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk berubah. Tentunya hal ini menjadi penghambat dalam mencari peluang yang dilakukan pemimpin.

Dalam menghadapi perubahan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan tempat tinggal, telah dibuat Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Tantangan selanjutnya yang harus dihadapi yakni keterbatasan lahan dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini disiasati pemimpin dengan adanya perijinan IMB untuk

menyediakan lahan hijau maksimal 25% dari luas bangunan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi pemimpin untuk berubah menjadi lebih baik dengan menjadikan 'Kota Kudus ditengah Taman' adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menjaga Ruang Terbuka Hijau. Hal ini menjadikan pemimpin menjadi sedikit terhambat dalam melakukan inovasi-inovasi dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau jika masyarakat masih sulit untuk diajak berubah.

3. Sumber Daya

Dalam hal ini sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus untuk penataan dan mengembangkan RTH terbagi menjadi sumber daya materi dan sumber daya non materi. Berikut ini analisis sumber daya yang digunakan pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau:

a. Kecukupan dan Kompetensi Pegawai

Jumlah sumberdaya manusiayang cukup dan berkompeten dibutuhkan sebagai penunjang pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini dimaksudkan agar implementasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau akan berhasil dengan kecukupan dan kompetensi pegawai.

Hasil penelitian bab tiga menunjukkan bahwa kecukupan pegawai di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup sudah mencukupi, namun kompetensi perlu ditingkatkan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus sudah termasuk cukup memenuhi sebagai syarat aparatur negara, hanya saja kompetensi perilaku kerja yang dimiliki pegawai yang berpendidikan tinggi dengan pegawai yang ada dibawahnya belum terlihat mencolok,

b. Peralatan yang Diperlukan

Peralatanyang memadai dibutuhkan sebagai penunjang pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini dimaksudkan agar implementasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau akan berhasil dengan peralatan yang memadai.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau masih kurang, terutama peralatan mobil hidrolis untuk memotong pohon diatas 10 meter seperti yang berada di Jalan Ramelan dan Jalan Loekmonohadi. Hal tersebut tentu akan menghambat kegiatan Ruang Terbuka Hijau, sehingga hal yang bisa dilakukan pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang masih menggunakan tangga manual.

c. Anggaran

Sumberdayakeuanganyang besar dibutuhkan sebagai penunjang pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini dimaksudkan agar implementasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau akan berhasil dengan adanya anggaran yang besar.

Hasil penelitian bab tiga menunjukkan bahwa anggaran untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2016 sudah besar yakni Rp. 4.600.000.000,-. Anggaran tersebut nantinya difokuskan pada pembangunan taman *rest area* di Tanggul Angin. Namun besarnya anggaran untuk pembangunan taman, masih minim untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, sehingga tidak ada keseimbangan antara pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan pemeliharannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dapat disimpulkan adalah mengenai komitmen pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di

Kabupaten Kudus dan faktor penghambat komitmen pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus.

1. Komitmen Pemimpin dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus

a. Sikap Pemimpin

Dalam mencapai tujuan untuk mengembangkan RTH dibutuhkan sikap pemimpin dengan praktik kepemimpinan yakni dimulai dengan memberikan contoh. Sikap teladan yang diberikan pemimpin masih kurang dilakukan secara maksimal, sehingga masyarakat tidak bisa melihat bentuk keteladanan yang diberikan pemimpin. Dalam menginspirasi visi dilakukan dengan menyampaikan gagasan “Kota ditengah Taman”. Namun dalam upaya pengembangan Ruang Terbuka Hijau terkendala oleh keterbatasan lahan. Selain itu kesadaran masyarakat untuk menjaga keberadaan Ruang Terbuka Hijau masih rendah.

b. Peran Pemimpin

Komitmen pemimpin dapat dikatakan bagaimana pemimpin menjalankan perannya untuk bawahan dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan RTH yang sudah ditentukan yakni minimal 30%. Peran pengambilan keputusan yang diambil oleh pemimpin sudah dilakukan dengan semestinya dan sesuai prosedur namun dalam skala prioritas terkait RTH masih tergolong rendah jika dibanding dengan urusan lain. Peran memengaruhi dilakukan dengan mengajak bawahan dan masyarakat untuk mewujudkan “Kota Kudus ditengah Taman”, ajakan yang disampaikan tersebut berdampak hingga mempengaruhi bawahannya.

c. Janji pemimpin:

Pelaksanaan komitmen pemimpin tidak hanya sekedar janji seremonial yang

diucapkan ketika pelantikan, namun kenyataannya belum ada peraturan daerah tentang Ruang Terbuka Hijau dan masih ditemukan penolakan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau yakni ketika pembangunan Taman Menara.

2. Faktor Penghambat Komitmen Pemimpin dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus :

a. Komunikasi

Dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau yakni penyampaian informasi yang diberikan pemimpin hingga ke masyarakat sudah disampaikan melalui komunikasi berjenjang namun belum ada perubahan perilaku yang terlihat secara signifikan, sehingga tujuan dari pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan mengajak masyarakat masih menjadi kendala.

b. Lingkungan organisasi

Pemimpin beradaptasi dalam menghadapi dinamika pengembangan Ruang Terbuka Hijau masih terhambat. Hal ini dikarenakan masyarakat masih sulit untuk diajak berubah. Selain itu masih belum adanya Peraturan Daerah.

c. Sumberdaya

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam komitmen pemimpin. Kecukupan pegawai di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup sudah mencukupi, namun kompetensi yang dimiliki masih harus dikembangkan. Sedangkan peralatan yang diperlukan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau masih kurang, terutama peralatan mobil hidrolis. Anggaran untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau sudah cukup besar, namun besarnya anggaran untuk pembangunan

taman, masih minim untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti lakukan, maka berikut ini disajikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi komitmen pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau.

- a. Dalam memberikan teladan yang diberikan pemimpin, sebaiknya dilakukan dengan ikut membaur dalam kegiatan yang diikuti oleh masyarakat seperti halnya CFD, kerja bakti, maupun jalan santai. Keteladanan yang diberikan dapat dilakukan ketika adanya masyarakat yang membuang sampah di area RTH dalam kegiatan CFD maupun jalan santai, pemimpin dapat memberikan teguran, memberikan contoh untuk membuang sampah di tempat sampah.
- b. Dalam meningkatkan sikap pemimpin terkait mencari peluang dari keterbatasan lahan sebaiknya pemimpin mencari lahan-lahan yang tidak terpakai dan selanjutnya dapat dibangun Ruang Terbuka Hijau. Seperti di lokasi Desa Purwosari depan SMA 2 Kudus terdapat lahan yang duduh tidak terpakai milik pemerintah yang dulunya merupakan area terminal.
- c. Peran Forum Komunitas Hijau (FKH) yang cukup membantu pemimpin lebih dioptimalkan dengan melakukan kegiatan dengan mengajak masyarakat untuk mencabut paku di pohon. Selain itu, FKH sebaiknya mengoptimalkan peran dengan memberikan bibit tanaman pada acara seperti CFD ataupun acara lainnya yang dihadiri oleh masyarakat. Sebaiknya Satpol PP memberikan sanksi seperti teguran atau pemberian informasi pentingnya menjaga fasilitas RTH kepada masyarakat yang melanggar.
- d. Dalam meningkatkan peran pemimpin terkait peran pengambilan keputusan, sebaiknya pemimpin menetapkan skala prioritas yang cukup tinggi terhadap Ruang Terbuka Hijau. Hal ini dikarenakan eksisting Ruang Terbuka Hijau masih 8%. Sehingga prioritas lingkungan harus tetap diperhatikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- e. Janji pemimpin terkait legalisasi penegakan hukum atas janji program Ruang Terbuka Hijau, sebaiknya sesegera mungkin pemimpin membuat Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan agar mencegah penggeseran kawasan Ruang Terbuka Hijau menjadi pemukiman dan adanya efek jera terhadap masyarakat yang melanggar.
- f. Dalam meningkatkan faktor sumber daya terkait kecukupan dan kompetensi pegawai, sebaiknya pegawai diikuti sertakan dalam diklat dan seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau mendatangkan narasumber dari luar, sehingga pengetahuan dan keahlian pegawai bertambah terutama untuk pegawai baru.
- g. Dalam meningkatkan faktor sumber daya terkait peralatan yang dibutuhkan, sebaiknya Pemerintah Daerah mengupayakan adanya mobil hidrolis yang dibutuhkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Sehingga hal ini tidak mengambat dalam proses pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- h. Dalam meningkatkan sumber daya anggaran, sebaiknya dialokasikan dengan jumlah yang semakin besar terutama untuk biaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini dikarenakan kondisi taman seperti taman Ganesha dan taman Gondang Manis yang masih terkesan kumuh

dan tidak rindang lagi, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budihardjo, Eko. (1999). *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Burt Nanus. (2001). *Kepemimpinan Visioner*. Jakarta : Prenhalindo.
- Handoko, Hani T. dan Reksomadiprodjo, S. (1997). *Organisasi Perusahaan* (cetakan kesepuluh). Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hasibuan, Malayu SP, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Ibrahim, Amin. (2009). *PokoK Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Kencana Syafiie, Inu. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 2. Alih Bahasa oleh HendraTeguh , Ronny A Rusly, Benjamin Molan. Edisi Milenium. Jakarta : PT.Prenhallindo.
- Kouzes, James and Barry Posner. (2004). *The Leadership Challenge*. Jakarta: Erlangga.
- Mufiz, Ali. (2004). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Nanus,Burt. (2001). *Kepemimpinan Visioner*. Jakarta: Prenhalindo
- Pamudji, S. (1995). *Kepemimpinan : Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara
- Pasolong, Herbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veithzal. (2009). *Perilaku Organisasi dan Teori Kepemimpinan* Jilid II. Jakarta: PT. Salemba.
- Robbins, S.P. (2003). *Organizational Behavior*. Prentice Hall. New Jersey.
- Siagian. (2002). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Adminitrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Wahyusumidjo. (1994). *Kiat Kepemimpinan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:PT. Harapan Masa PGRI – Jakarta
- Wibowo, J. (2014). *Sejarah Singkat Sistem Pendukung Keputusan*. Jakarta: Salemba Empat
- Widodo, Joko.(2011).*Analisis kebijakan publik (Konsep dan Aplikasi*

Proses Kebijakan Public).
Malang: Bayumedia

Rostyaningsih, Dewi dan Titik Djumiarti.
(2010). *Komitmen Pemimpin*

dalam Pelayanan Publik di
Kabupaten Purbalingga Jawa
Tengah. *Laporan Penelitian.*
Universitas Diponegoro.